

PUTUS SEKOLAH

POTRET BURAM PENDIDIKAN KITA

Unifah Rosyidi

Dosen FIP Universitas Jakarta & Sekretaris Bidang Pendidikan PB PGRI

W.M. Rachmawan

Mahasiswa Program Magister Filsafat Universitas Indonesia

School drop-out, illiteracy and gender equilibrium are some of the serious problems faced by developing countries, Indonesia is no exception. In 1984, Indonesia declared a state-sanctioned movement of six-year basic education, followed by a similar movement of nine-year obligatory education which should have been thoroughly completed in 2004. It seemed that due to economic crisis, this program had to be stretched out to the year 2009, especially after Indonesia has given its commitment to Dakar accord on Education for All. The logical consequence of this accord is that by the year 2015 Indonesia should be free from illiteracy and by the year 2008 the program of nine-year obligatory education should be completely realized. This is a difficult test on the government's commitment in this case. This article is an attempt to describe a common phenomenon of school-drop-out along with the exposure of the root of the problem, the alternative solution, the constraints, and the critical notes. The key to the problem is the seriousness on the part of the government and schools as well as the awareness of the society.

A. Gambaran Umum

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas diri. Pendidikan adalah ruang eksistensi bagi manusia sebagai makhluk yang berkesadaran. Pendidikan juga ada-

lah pintu menuju tempat yang bermakna dan bermartabat. Pendidikan adalah alat pembebas dari kebodohan, suatu cara mewujudkan dan menjadi manusia.¹ Dengan pendidikan manusia mampu mengetahui dan mengenal segala fenomena yang ada di sekitarnya baik feno-

¹ Lihat M. Escobar, (Editor), 1998, *Dialog Bareng Paulo Freire: Sekolah Kapitalisme Licik*, Yogyakarta, LkiS, h. xiii.

mena alam maupun sosial. Melalui pendidikan, manusia dapat melakukan mobilitas vertikal membangun kesejahteraan diri dan lingkungannya. Melalui pendidikan pula, manusia mampu menguasai dan membangun peradaban dunia sebagai makhluk "ada" yang memiliki kesadaran kritis. Atas dasar itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar manusia.

Kesadaran bangsa-bangsa di dunia akan betapa pentingnya pendidikan dapat dilihat dalam kesepakatan Deklarasi Dakar tahun 2000. Mereka berkomitmen bersama untuk membelajarkan anak dalam ruang pendidikan formal melalui misi yang dikenal dengan *Education For All*. Gaungnya terasa di mana-mana, mengikat secara moral semua negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Dengan demikian setiap anak pada usia sekolah (7-15 tahun) wajib memperoleh pendidikan formal. Negara memiliki kewajiban etis dan strategis untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Kesempatan memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintahan negara-negara di dunia tanpa kecuali sebagaimana di-

nyatakan dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948.

Dewasa ini sistem pendidikan di berbagai belahan dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi turut mendukung keadaan demikian. Negara-negara di dunia meyakini dan berlomba untuk mengembangkan sistem pendidikan sebaik mungkin untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berbasis pengetahuan. Karena penguasaan pengetahuan dan teknologi terbukti dalam sejarah telah megantarkan bangsa-bangsa maju mampu mensejahterakan rakyatnya bahkan menguasai perekonomian dunia. Masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan disebut sebagai "masyarakat yang berbasis pengetahuan" (*knowledge based society*).² Mereka kini menikmati kemakmuran dan menguasai dua pertiga aset perekonomian dunia. Sementara itu, sepertiga sisanya, diperebutkan oleh begitu banyak negara-negara berkembang dan miskin.

Akibatnya, terjadi ketimpangan yang sangat besar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau miskin. Negara-

² Lihat H.A.R. Tilaar, 2004, *Universitas dan Pendidikan Guru*, UNJ Press; lihat juga Thomas A. Stewart, 2001, *The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and the twenty First Century Organization*, London, Nicholas Brealey Publishing.

negara miskin terutama di Asia dan Afrika mengalami ketertinggalan yang sangat jauh dibandingkan negara-negara kaya (Barat) dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menghadapi permasalahan yang hampir seragam, yaitu tidak adanya dana untuk pengembangan pendidikan, korupsi merajalela, pelayanan publik yang buruk dan *political will* dari pemerintah yang kurang untuk membangun sistem pendidikan yang berdaya, suatu sistem yang dapat membangunkan segenap komponen bangsa untuk maju.

Sebagai gambaran, permasalahan pendidikan terutama yang terjadi di negara-negara dunia ketiga dapat dicermati pada data statistik UNESCO tahun 1990 berikut ini:

- Lebih dari 100 juta anak di dunia, 60 juta anak perempuan, tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.
- Lebih dari 960 juta orang, 2/3 - nya perempuan, buta huruf dan menjadi masalah serius di semua negara dalam pembangunan.
- Lebih dari 1/3 penduduk dunia tidak memiliki akses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam merespon perubahan sosial dan budaya

- Lebih dari 100 juta anak dan dewasa mengalami putus sekolah sehingga tidak mampu mengembangkan dirinya

Sebagai akibat dari miskin dan bodohnya masyarakat, dunia dihadapkan pada berbagai masalah seperti : kemiskinan, pertumbuhan ekonomi rendah, pertumbuhan penduduk tinggi, kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin yang semakin lebar, peperangan, sempitnya lapangan kerja, kriminalitas, pencegahan kematian jutaan anak dan masalah lingkungan. Masalah-masalah tersebut memerlukan penyelesaian yang serius dan sistemis. Pilihan yang tepat adalah keberpihakan pada dunia pendidikan. Pendidikan memiliki nilai strategis jangka panjang, hasilnya tidak segera tampak (*unquick yielding*), namun dalam satu dekade pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan dunia kerja akan mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan oleh China dan India yang terbukti sangat mengesankan dunia dengan keberhasilan pembangunan ekonominya. Mereka memprioritaskan pendidikan dalam rencana pembangunan nasionalnya. Sachs menulis: "*Since 1978, China has been the world's most successful economy... The engine of growth are still running strong... the basic reason for the growth is specifically adopting the*

*technologies of the leading innovating countries*³.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan terutama teknologi informasi serta adanya berbagai lembaga internasional yang peduli terhadap permasalahan pendidikan menerbitkan harapan baru dalam upaya penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dunia. Diharapkan, lembaga-lembaga internasional ini dapat bersinergi dengan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memberantas buta huruf, menekan angka putus sekolah, dan mencegah meluasnya pekerja anak yang sangat rawan eksploitasi. Di atas semua itu, dapat mendorong pemerintah setempat untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam pendidikan tanpa mengabaikan kualitasnya. Untuk itu lah pentingnya kesepakatan Deklarasi tahun 2000 dalam bingkai *pendidikan untuk semua* sebagai sebuah tujuan bersama yang harus diwujudkan.

Kesadaran bersama tersebut menghasilkan berbagai komitmen

kuat di antara negara-negara di dunia agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya melalui pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar akan pendidikan itu antara lain menyangkut prasarana belajar dan proses belajar sehingga manusia mampu untuk mempertahankan hidup, membangun kapasitas diri, hidup dan bekerja di lingkungan yang nyaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, membuat keputusan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Diharapkan pula manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya yaitu dengan membangun budaya gotong royong, menjaga nilai budaya dan spiritual, menyebarkan pendidikan kepada sesama, menghilangkan penyebab ketidakadilan sosial, melestarikan lingkungan hidup, membangun toleransi antar sesama, memiliki kesempatan dalam sistem politik dan agama, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan berpartisipasi aktif dalam me-

³China dalam 20 tahun ini mengalami perkembangan amat pesat, berhasil mengurangi penduduk miskin lebih dari 1 Milyar, dari 64% pada tahun 1981 menjadi 17% pada tahun 2001. Kunci dari keberhasilan China adalah memasukan sains, teknologi dan pendidikan dalam grand design pembangunan nasional China. Demikian juga India, yang dalam 10 tahun terakhir berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 42% menjadi 35%. Ekonominya juga menunjukkan kemajuan yang fantastis. Kunci keberhasilan India terletak pada pembangunan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi. Lihat Jeffrey Sachs, *The End of Poverty*, 2005 dalam artikel Ary Mochtar Pedju, *Sains, dan Pendidikan China Vs Kita*, Kompas, 24 November 2005, h.7.

wujudkan perdamaian dan solidaritas dunia.

Untuk menindaklanjuti program pendidikan untuk semua, berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah di berbagai negara membuat komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam *Framework for Action to Meet Basic Learning Needs* sebagai kelanjutan dari *World Declaration on Education for All* pada *World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000*. Forum tersebut menghasilkan berbagai komitmen bersama untuk melakukan berbagai tindakan dalam memberantas buta huruf, anak putus sekolah dan juga mewujudkan kesetaraan gender. Negara-negara peserta memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pendidikan untuk semua melalui berbagai upaya termasuk kerjasama erat antar negara dengan dukungan dari berbagai lembaga regional maupun internasional.

Pada forum tersebut dilaporkan juga bahwa telah terjadi kemajuan cukup signifikan dari berbagai negara dalam menyelenggarakan program *Education for All*. Akan tetapi masih meninggalkan pekerjaan besar untuk memikirkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti: ada lebih dari 113 juta anak yang masih tidak memiliki kesempatan memperoleh pen-

didikan dasar, 880 juta orang buta huruf, diskriminasi gender pada sistem pendidikan, dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia secara individu maupun masyarakat. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bersama untuk merumuskan target-target sebagai berikut:

- memperluas dan meningkatkan kepedulian terhadap anak sejak dini dan pendidikan secara komprehensif, terutama anak-anak yang tidak beruntung
- tahun 2015 semua anak, terutama anak perempuan, yang berada di negara-negara miskin dan berasal dari etnis minoritas, harus memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas
- semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan berjenjang dan program kecakapan hidup (*life skill*)
- berkurangnya 50% angka buta huruf pada tahun 2015, terutama kaum perempuan, dan juga berhak memperoleh pendidikan dasar sampai jenjang yang lebih tinggi.
- menghilangkan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005

dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015

- meningkatkan berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

Dalam upaya mencapai target-target tersebut maka para peserta konferensi dari berbagai lembaga dan pemerintah berbagai negara merancang program-program sebagai berikut:

- menyatukan segenap kekuatan nasional dan internasional sebagai komitmen politik untuk *Education for All*, mengembangkan program nasional dan perhatian serius pada pendidikan dasar
- mensosialisasikan kebijakan yang dihasilkan forum *Education for All*
- meningkatkan partisipasi dalam formulasi, implementasi, dan monitoring strategi pengembangan pendidikan
- membangun sikap responsif, partisipatif dan akuntabilitas manajemen pendidikan
- mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mereduksi konflik yang bertujuan membangun budaya damai dan toleran

- menerapkan strategi terintegrasi bagi kesetaraan gender pada pendidikan melalui perubahan pola pikir, sikap dan pada tataran praktis
- menerapkan kurikulum urgensi pada program pendidikan dan pemberantasan HIV/AIDS
- mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, sehat, terbuka dan dapat dinikmati semua orang dari berbagai kalangan
- meningkatkan profesionalisme guru
- memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan *Education for All*
- melakukan monitoring secara sistematis pada pencapaian program *Education for All* di semua kawasan
- membangun suatu mekanisme untuk mempercepat penerapan dan pencapaian tujuan *Education for All*

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, persoalan buta huruf dan putus sekolah juga mendapat perhatian serius. Indonesia tentunya tidak ingin dicap sebagai negara yang melanggengkan kebodohan dan kemiskinan. Indonesia ingin bangkit untuk menjadi negara

yang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dulu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai program dan dana yang cukup besar dikeluarkan. Target sebagaimana yang telah digariskan dalam kesepakatan Dakkar tahun 2000 haruslah menjadi pemacu untuk terus bekerja secara maksimal dan profesional. Harga diri dan martabat sebagai bangsa yang berdaulat menjadi taruhan. Depdiknas sebagai ujung tombak insitusi negara secara perlahan telah menunjukkan kinerjanya dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam memerangi persoalan buta huruf dan putus sekolah.

B. Putus sekolah: Kondisi Objektif dan Akar Persoalan

Program Wajar telah dimulai 20 tahun silam tepatnya pada tanggal 2 Mei 1984 oleh presiden Soeharto. Wajar yang dimaksud diperuntukkan untuk anak sekolah dasar 7-12 tahun. Pada saat itu Angka Partisipasi Kasar telah melampaui angka 100% yaitu 107.56%. Menurut Hamid Muhammad, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

secara kuantitatif target pencapaian wajar 7 tahun telah tuntas, namun berbagai indikator lain perlu dicermati dan dipertanyakan. Indikator yang dimaksud adalah adanya angka putus sekolah, melanjutkan ke SMP, mengulang serta kualitas SD yang patut dipertanyakan. Pada tahun 1990/1991 terdapat 1 juta siswa SD (4.01%) siswa putus sekolah. Hanya sekitar 40% yang melanjutkan ke SMP, dan 2-5 juta siswa yang harus mengulang. Selain itu, kualitas di SD masih memprihatinkan, ada 105.000 kelas yang rusak, sekolah mengeluh kekurangan buku, dan ada sekitar 983.000 guru hanya lulusan SPG.⁴

Pada tahun 1994 pemerintah melanjutkan program wajar menjadi 9 tahun. Dengan demikian seluruh anak Indonesia yang berusia antara 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan formal. Pada saat dimulai Wajar 9 tahun APK SMP baru mencapai 56.44%. Dari 13.7 juta siswa usia SMP (13-15) tahun baru sekitar 40%-an tepatnya 7.7 juta jiwa yang sudah berpendidikan SMP. Perkembangan pencapaian wajar 9 tahun dari 56.44% pada tahun 1994 hingga 11 tahun kemudian tahun 2004 baru mencapai angka APK 81.65%. Disadari pencapaian ini tidak maksimal karena pada tahun

⁴ Lihat *Penuntasan Wajib Belajar: Batu Ujian bagi Pemerintahan SBY-JK*, Kompas, 29 November 2005, h. 14.

1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi disusul krisis multi dimensi yang hingga kini masih memukul perekonomian negara. Beban hidup masyarakat menjadi sangat berat, pilihannya pendidikan bukanlah prioritas bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Bagaimana dengan fenomena putus sekolah? Menurut data yang dikeluarkan Balitbang Kompas (2005) dan Balitbang Depdiknas (2005) disinyalir banyak siswa yang mengalami putus sekolah. Ada sekitar 154.000 (2.96%) anak SMP putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah SD lebih mencengangkan lagi yakni 767.000 siswa (2%) anak usia SD yang tidak bersekolah.⁵

Agaknya krisis ekonomi benar-benar memukul perekonomian masyarakat yang nota benanya sebagian besar masih miskin. Dalam tabel yang disajikan berikut ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000/2001 ketika krisis sedang hebat-hebatnya melanda Indonesia menunjukkan bahwa ada sekitar 5.5% siswa sekolah dasar yang tidak terlayani, dan jumlahnya membengkak menjadi 44.30% untuk anak usia 13-15 tahun. Angka yang tidak terlayani makin membengkak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk anak usia 16-18 tahun sekitar 67.68%, sedangkan mereka yang berusia di perguruan tinggi yakni 19-24 tahun terdapat 85.95% yang tidak terlayani.⁶ Apabila ditelusuri lebih jauh, dapat disampaikan beberapa pertanyaan kritis untuk mengungkap fakta dibalik fenomena data tersebut. Misalnya, apakah siswa yang tidak terlayani itu karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah sehingga memutuskan berhenti sekolah? Kalau ya, dengan alasan membantu ekonomi mereka masuk dalam pasar kerja marginal yang sangat rawan. Pekerjaan apa saja yang dimasuki anak putus sekolah tersebut? Bagaimana dengan perlindungan kerja mereka? upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan negara untuk melindungi hak pendidikan mereka? dan sejumlah pertanyaan lain dari variabel lain yang dapat disampaikan secara kritis untuk mengungkap kondisi tersebut. Namun yang pasti, bagaimana kita menjelaskan fenomena putus sekolah ini?

⁵ Ibid.

⁶ Indonesia –Educational Statistic in Brief, 2001-2002, Balitbang Diknas.

Betapa Besarnya Penduduk yang Membutuhkan Layanan Pendidikan

UMUR	JUMLAH	APM	Yg Tidak Terlayani di Jenjang yg Sesuai	
7 - 12	25,857,117	24,434,976	1,422,141	5.50%
13 - 15	13,095,083	7,293,961	5,801,122	44.30%
16 - 18	13,466,700	4,352,759	9,113,941	67.68%
19 - 24	25,784,500	3,688,794	22,095,706	85.69%
JUMLAH	78,203,400	39,770,490	38,432,910	49.14%
0 - 6	26,172,763	7,159,200	19,013,563	72.65%
JUMLAH	104,376,163	46,929,690	57,446,473	55.04%

Sumber : Indonesia-educational statistics in brief 2001/2002; Balitbang Diknas

Putus sekolah adalah persoalan serius dalam dunia pendidikan kita. Ia ibarat duri dalam daging yang terus menusuk dan menggoda. Ia seperti bopeng di wajah kita yang secara langsung mengurangi daya tarik, bahkan bisa menjadi sasaran tembak kampanye negatif (*black campaign*) pihak dan negara tertentu terhadap realitas pendidikan di Indonesia, dengan dalih bahwa pemerintah Indonesia tidak serius atau setengah hati dalam mencerdaskan anak bangsanya.

Putus sekolah, tentu tidak hadir begitu saja. Ada banyak sebab yang melatarinya. *Pertama*, soal kesulitan

ekonomi (kemiskinan) dan mahal-nya biaya pendidikan. Menurut hasil survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 menyebutkan 67% alasan masyarakat tidak bersekolah atau putus sekolah karena ketiadaan biaya. Sementara Hamid menunjukkan angka yang lebih besar yaitu 76% anak putus sekolah karena tidak adanya biaya. Sisanya adalah faktor lain seperti ketidakmampuan mengikuti pelajaran, larangan orang tua, harus bekerja dan faktor geografis.⁷ Dengan demikian biaya adalah faktor utama penyebab anak putus sekolah.

⁷ Kompas, op.cit. h.14

Kedua, cara pandang/sikap terhadap dunia pendidikan. Cara pandang ini ada yang sifatnya khusus dan kultural seperti masalah gender sehingga anak putus sekolah lebih banyak perempuan. Anak perempuan pada masyarakat tertentu masih dipandang sebagai *the second sex* yang hanya memiliki fungsi domestik, sedangkan fungsi sosial dan ekonomi hanya milik anak laki-laki. Sedangkan cara pandang yang sifatnya umum berkaitan dengan pendidikan itu sendiri, misalnya cara pandang bahwa pendidikan tidak mampu memberikan jaminan akan masa depan yang lebih baik. Pendidikan hanya membuang-buang waktu dan biaya. Pendidikan adalah jalan panjang yang tidak jelas. Ungkapan sinis yang muncul misalnya: bapak dan ibu tidak sekolah tapi bisa naik haji, membeli mobil mewah dan rumah megah serta harta berlimpah. Ungkapan ini memang cenderung materialis dalam arti mereduksi arti pendidikan hanya sebagai upaya pencarian materi *an sich*. Ini persoalan mental dan realitas yang sangat serius. Sesungguhnya pendidikan tidak menafikkan agar orang menjadi kaya secara materi, bahkan dengan pendidikan orang dapat memperoleh kekayaan materi, lebih terpandang dan terhormat di tengah komunitas masyarakat. Permasalahannya adalah cara pandang mengejar materi sebagai satu-satunya

tujuan itu yang dipertanyakan. Cara pandang seperti ini dapat menjadi penyakit masyarakat, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan material dengan jalan apa saja termasuk tentu saja korupsi. Adakah korupsi yang disinyalir telah menjadi korupsi berjamaah disebabkan oleh perubahan nilai dan cara pandang masyarakat yang cenderung hedonistis, machiavelis? Tentu memerlukan penelusuran dan penelitian yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada satu sindiran yang patut kita renungkan: semakin pandai seseorang, makin berpeluang untuk menjadi seorang 'maling'. Lagi-lagi adagium "ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu menjadi lemah" mendapat pembenarannya. Tugas mulia pendidikan adalah bagaimana mengubah mental yang liar menjadi mental yang humanis. Merombak cara berfikir ortodok dan konservatif serta mengembangkan anak agar berdaya secara akal/nalar (*intelegency quesioni*), emosi (*emotional intelegence*) dan spiritual (*spiritual intelegence*). Untuk itu dibutuhkan proses penyadaran secara kontinyu dan terukur dengan media serta program yang jelas.

Ketiga, perbedaan latar belakang dan status sosial. Dalam lingkungan perkotaan kondisi ini cukup terasa. Anak-anak dari keluarga kurang

mampu sering kali merasa minder dalam interaksi sosial dan bergaul dengan teman-temannya khususnya dari keluarga kaya. Anak-anak akan berkumpul dan berada dalam komunitas yang setara, dan senasib dengannya. Karena itu, disisi lain sesungguhnya pendidikan melanggengkan jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Keempat, gangguan keamanan akibat konflik seperti terjadi di Aceh. Banyak keluarga yang harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lain demi memperoleh rasa aman. Orang tua terpaksa meninggalkan mata pencaharian sehari-hari baik itu yang bertani maupun berdagang. Sawah, ladang dan hewan piaraan ditinggalkan padahal itulah sumber nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Masa DOM (Daerah Operasi Militer), Darurat Militer I dan II, sudah barang tentu menyisakan cerita duka bagi anak bangsa. Mereka berpindah-pindah mengikuti pola orang tuanya, putus sekolah menjadi pemandangan biasa. Belum lagi ada beberapa sekolah yang dibakar, guru ditembak orang tidak dikenal sehingga menyisakan trauma mendalam bagi siswa, bahkan karena semua itu akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain berhenti sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kelima, hambatan geografis. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah, transportasi yang sulit, lokasi sekolah yang sulit dijangkau, secara tidak langsung dapat menghambat anak untuk sekolah.

Putus sekolah juga dapat menjelaskan adanya sebuah fenomena munculnya pusat kekuasaan baru yang bernama sekolah. Dengan format manajemen berbasis sekolah, sekolah dan komunitasnya memiliki otoritas untuk menentukan apa saja yang dianggap penting untuk sekolah. Disini permainan yang *tricky* di mulai. Dengan alasan membangun mutu dan fasilitas pembelajaran, sekolah dapat menentukan berapa jumlah dana pembangunan maupun dana-dana lain yang dapat dibuat justifikasinya. Komite sekolah yang diharapkan memiliki fungsi kontrol terhadap transparansi dan akuntabilitas sekolah lebih banyak menjadi stempel yang memperkokoh posisi sekolah. Akibatnya, orang tua siswa tidak sanggup membayar biaya sekolah yang makin mahal dan tidak terjangkau. Sekolah makin membebani anak didik terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Disini sekolah berlaku hukum siapa yang kuat itu yang menang. Kalau tidak mampu bayar, lebih baik cari sekolah yang lain.

Fenomena di atas semakin menegaskan bahwa pendidikan melang-

gengkan jurang antara yang kaya dan miskin, berpihak kepada yang mampu. Untuk mendapatkan sebuah kursi di sekolah yang mutunya relatif baik, orang tua harus rela mengeluarkan uang jutaan rupiah. Akibatnya hanya siswa yang kaya yang dapat bersekolah di sekolah bermutu. Banyak peristiwa memilukan yang kita lihat dan dengar dalam realitas hidup sehari-hari. Berita anak SD yang gantung diri di Tegal, Jawa Tengah akibat tidak sanggup membayar biaya pendidikan, seorang anak meminum racun serangga tidak tahan ditegur gurunya karena belum membayar uang sekolah, anak perempuan yang diperkosa di jalanan karena membantu orang tuanya bekerja, pekerja anak yang tertatih di jermal, di pabrik-pabrik adalah salah satu potret buram pendidikan kita. Kemiskinan bukan hanya menyebabkan anak-anak berhenti sekolah, tetapi melemparkan manusia pada kenistaan, kemasabodohan dan keputusasaan yang tiada henti. Kemiskinan telah melanggengkan proses pembodohan. Putus sekolah bagi siswa dan orang tua adalah sebuah dilema dan pilihan yang pahit. Adakah anda tidak terketuk nuraninya dengan realitas ini?.

Keadaan semakin sulit pasca kenaikan harga BBM yang mencapai 100%. Ibaratnya sudah jatuh ter-

timpa tangga pula. Pemerintah memang menyediakan dana kompensasi BBM untuk keluarga miskin yang besarnya Rp 300 ribu/tiga bulan, akan tetapi apa artinya uang sebesar itu jika seluruh harga kebutuhan hidup turut naik?. Beratnya beban hidup juga berpengaruh terhadap kondisi gizi pada anak usia pra sekolah (0-5 tahun). Anak usia tersebut secara psikologis disebut sebagai *formative years*. Pada masa pembentukan ini diperlukan gizi yang memadai agar otak dan fisiknya berkembang optimal. Dikhawatirkan terjadi *lost generation* bila tidak ada perhatian khusus pemerintah dan berbagai pihak terhadap munculnya fenomena gizi buruk ini. Hal ini ternyata dapat kita lihat dengan banyaknya pemberitaan anak-anak yang menderita busung lapar, pholio, TBC yang menjadi cerminan gizi buruk dan sanitasi yang jelek. Pada skala makro kondisi ini juga berdampak pada rendahnya peringkat *Human Development Index (HDI)* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang disurvei. *Human developmen is a process of increasing people options*. Yang dimaksud dengan pilihan adalah: dapat menikmati kehidupan yang sehat dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan untuk mendukung kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang me-

madai.⁸ Dasar pokok penghitungan indeks pengembangan manusia tersebut adalah pendapatan nasional, pendidikan dan harapan hidup (*life expectancy*). Pada tahun 2004 posisi Indonesia berada di urutan 111 (setingkat di bawah Vietnam, tetapi jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia dan Thailand).

Fenomena itulah yang menyebabkan makin maraknya anak jalanan, pekerja anak di bawah usia atau bahkan pekerja seks anak-anak perempuan. Kondisi semacam itu dengan mudah dapat kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Anak-anak di bawah umur harus dihadapkan pada pasar kerja dan kenyataan hidup yang keras guna memenuhi kebutuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Anak-anak terpaksa harus merelakan kehilangan dunianya sebagaimana teman-teman seusianya bisa bermain dan bersekolah. Anak-anak ibarat buruh yang tereksplorasi secara fisik, padahal UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak dengan tegas melarang anak-anak bekerja baik di sektor formal maupun informal. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan sikap pemerintah yang masih membiarkan

sejumlah perusahaan yang mempekerjakan anak. Sanksi hukum yang rendah dan tidak konsisten menyebabkan sejumlah perusahaan besar terus mempekerjakan anak karena upah yang murah dan mudah dieksplorasi. Sebenarnya sanksi telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Negara harusnya peduli karena sudah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak dengan Keppres No. 36/1990. Melalui instrumen tersebut pemerintah dapat melakukan langkah-langkah: *Pertama*, respek dan tidak membuat peraturan yang mengeksplorasi anak. *Kedua*, melindungi hak anak dari kekerasan. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan pendidikan anak. *Keempat*, melakukan promosi dan sosialisasi hak-hak anak. Pertanyaannya adalah Bagaimana pemerintah menjawab realitas tersebut secara serius?

C. Mengoptimalkan Peran Pengambil Kebijakan dan Sekolah

Persoalan putus sekolah tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah semata tetapi juga

⁸ Yudo Swasono dan Endang Sulistyaniingsih, 1993, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Konsep Makro Untuk Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: CV Izufa Gempita, h.17

menjadi tanggung jawab masyarakat serta pihak-pihak yang peduli terhadap nasib anak bangsa. Memang banyak program pemerintah yang sudah dijalankan menyangkut pengentasan anak putus sekolah.

Pertama, program yang sifatnya memberikan bantuan keuangan seperti misalnya pada tahun 2004 ada JPS (Jaring Pengaman Sosial), DBO (Dana Bantuan Operasional) dan GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Selama tahun 2001, GN-OTA telah menyalurkan sumbangan 600 siswa yang besarnya Rp 100 ribu/bulan untuk SD dan Rp 125 ribu/bulan untuk jenjang SMP. Jika dilihat dari nominalnya sumbangan yang diberikan oleh GN-OTA itu tidak mampu mencukupi kebutuhan siswa sekolah sehingga rata-rata hanya bisa dipakai selama 6 bulan dari setahun yang diharapkan. Pada tahun 2003, Depsos menjalankan program rumah singgah dengan tujuan memberikan ruang dan kesempatan bagi anak jalanan untuk sedikit berteduh sembari belajar. Program ini belum memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan karena hanya sampai pada *pilot project* dengan alasan keterbatasan dana. Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah, apalagi dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun, kini memperoleh perhatian yang serius. Dana Program Kom-

pensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM untuk pendidikan yang disediakan pemerintah memang lebih diorientasikan agar anak tetap bersekolah. Oleh karena itu mencegah anak *droup out* (DO) atau putus sekolah serta memasukkan anak yang terhenti untuk dapat bersekolah kembali dengan memberikan bantuan beasiswa merupakan pilihan kebijakan yang baik. Namun, kenyataan di lapangan, upaya-upaya tersebut tidak otomatis menghilangkan keluhan keluarga miskin yang akses pendidikannya terhambat sehingga angka putus sekolah tetap merupakan persoalan yang sulit diatasi.

Kedua, program yang sifatnya non finansial seperti kejar Paket A, Paket B dan Paket C dan SMP Terbuka. Dalam konteks ini pemerintah juga terus mendorong anak-anak yang berusia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah tetap bisa mengikuti jenjang pendidikan formal SD dan SMP. Program baru yaitu Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga tengah diuji apakah efektif dan efisien serta sesuai harapan atau tidak. BOS merupakan dana kompensasi kenaikan harga BBM yang telah digulirkan sejak awal Maret dan awal Oktober 2005. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. Telah disepakati oleh panitia kerja DPR dalam RAPBN-P 2005

dana yang disediakan sejumlah Rp 6,27 triliun. Tetapi tentu saja dana sebesar ini masih belum dapat mencukupi kebutuhan sekolah gratis. Dari bahan sosialisasi PKPS-BBM yang digulirkan Depdiknas dan Depag, saat ini setidaknya terdapat 39 juta siswa. Dengan perincian 28,8 juta siswa SD dan sederajat dan 10,7 juta siswa SMP dan sederajat. Melalui perhitungan sederhana, dana yang dibutuhkan untuk tingkat SD yang berjumlah 28,8 juta siswa dikalikan dana BOS sebesar Rp 335 ribu/siswa maka pemerintah perlu menyediakan anggaran sebesar Rp 6.768.000.000.000 dan SMP sebesar Rp 3.468.800.000.000 (Ade Irawan/ICW, 2005).

Problem serius yang dihadapi dari setiap program baik itu melalui tangan birokrasi maupun secara langsung diserahkan ke sekolah (*block grant*) adalah adanya kerawanan yang memungkinkan terjadinya korupsi atau penyimpangan. Dalam temuan ICW ada 2 fase rawan dalam mekanisme BOS, yaitu: pertama, pada saat penyaluran dan *Kedua*, saat penggunaan dana di sekolah. Kekuasaan kepala sekolah yang amat besar dan sulit dikontrol serta tidak berdayanya komite sekolah disinyalir sebagai titik lemah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret, sistematis dan terukur untuk mengawasi secara

ketat mekanisme BOS sehingga mampu meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kebocoran dan dana itu benar-benar sampai kepada siswa yang berhak. Audit kelembagaupun harus mendapat prioritas untuk membuktikan apakah aliran keuangan BOS telah dibelanjakan sesuai kebutuhan yang semestinya atau tidak. Aparat penegak hukum harus serius memberantas apabila terjadi praktek-praktek yang jelas-jelas merugikan keuangan negara dan nasib rakyat miskin.

Pada tingkat sekolah, peran komite sekolah dan dewan guru sangatlah penting. Dua institusi ini harus mampu menjadi penjaga moral sekaligus investigator dalam menjaga wibawa sekolah. Ini adalah pertarungan apakah dewan guru dan komite sekolah akan menjadi "KPK" seperti di tingkat pusat atau bahkan akan menjadi bagian dari praktek korupsi. Kejujuran, integritas dan nilai-nilai moral guru akan menjadi taruhan dan bahkan digugat masyarakat apabila terperosok dalam praktek yang memalukan ini.

Demikian juga pada tingkat masyarakat kehadiran peran maksimal LSM, Muhammadiyah, NU, PUI yang selama ini *concern* dengan dunia pendidikan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (*conditio sine qua non*). Memang ini

pekerjaan sosial dan moral yang mensyaratkan komitmen, perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap nasib dunia pendidikan. Lembaga mana lagi yang akan peduli dan prihatin jika begitu banyak lembaga yang menjadi bagian dari praktek pemotongan dana kompensasi?

D. Catatan Kritis

Banyak hal yang perlu kita ungkap dan tuntaskan berkaitan dengan persoalan putus sekolah. *Pertama*, mengapa sudah banyak program dan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bantuan internasional, persoalan putus sekolah tak kunjung tuntas? Apabila masalahnya pada kesulitan ekonomi dan kemiskinan, berarti secara makro ada yang salah dalam tata kelola sistem ekonomi negara. Selain itu, apakah tidak dapat dilakukan program-program yang ketat, memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi dan upaya-upaya lain yang dapat memotong rantai kemiskinan? Berkaitan dengan sikap sebagian masyarakat yang tidak memiliki virus untuk bekerja keras dan berprestasi, McClelland menyebutnya sebagai virus *N-Ach* (*Need for Achievement*) sehingga kalah bersaing dan menjadi miskin. Apakah tidak ada suatu cara yang dapat membangkitkan etos kerja sebagaimana

etos harakiri bagi masyarakat Jepang yang menegakan kehormatan dan harga diri di atas segala-galanya? Apakah sistem pendidikan sudah sedemikian jauh melenceng sehingga tidak mampu menghasilkan anak-anak bangsa yang berkualitas dan mandiri? Apabila uang negara yang seharusnya untuk anak-anak agar bisa sekolah terganjal praktek korupsi oleh oknum di setiap lini pemerintahan mulai dari pusat, daerah dan bahkan sekolah, maka patut diduga metode apapun akan rawan penyimpangan apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat serta tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada publik.

Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara serius menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pemerintah yang kuat dan sehat adalah adanya pemerintah pusat dan daerah yang sama-sama kuat. Ego sektoral yang ditujukan pemerintah daerah dengan membuat berbagai peraturan daerah yang merugikan para guru dan atau pendidikan secara umum harus dihentikan. Perhatian dan kepedulian harus benar-benar diwujudkan dalam menjamin akses pelayanan pendidikan yang bermutu bagi semua peserta didik tanpa kecuali. Jangan sampai karena miskin anak-anak tidak memiliki akses pada pendidikan yang ber-

mutu. Karena itu kebijakan perluasan dan akses pendidikan harus dibarengi dengan kebijakan mutu dan relevansi. Pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin mencegah tidak terjadinya siswa putus sekolah. Bila terjadi, anak yang putus sekolah pada usia wajar 9 tahun perlu dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diidentifikasi dan berikan kesempatan belajar kembali melalui paket belajar alternatif yang tersedia seperti paket A/B/C atau SMP Terbuka.

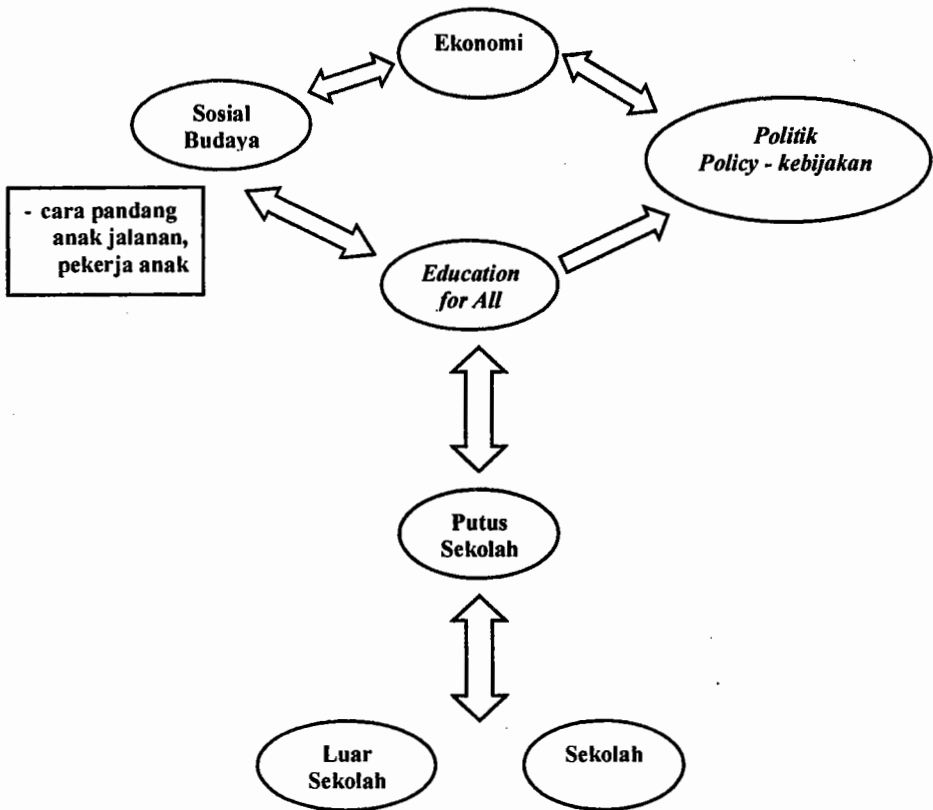
Adanya komitmen yang kuat dari para elit dan pengambil kebijakan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak serta kualitasnya. Potret busung lapar yang sempat diekspos beberapa waktu lalu membuktikan bahwa elit pengambil kebijakan hanya menerima laporan yang baik-baik saja, jarang atau bahkan tidak pernah turun melihat realitas masyarakat secara langsung. Harusnya sikap dan perhatian serta kepedulian semacam itu menjadi program yang baku, kontinyu dan permanen sehingga tidak muncul kesan bahwa para elit hanya dekat dengan rakyat di saat mereka membutuhkannya. Program kerja itu juga sekaligus menjadi bahan evaluasi apakah pejabat pada level di bawahnya atau yang paling bawah bekerja dengan baik dan optimal atau tidak. Demikian juga soal anggaran, perlu ada mekanisme yang

jelas serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Pemborosan anggaran untuk sesuatu yang tidak urgen dengan dalih studi banding ke luar negeri kerap kali menjadi tradisi buruk para politisi baik itu di tingkat pusat maupun daerah harus diakhiri.

Ketiga, mewujudkan kesepakatan *Education for All* adalah jalan terjal yang berliku dan memerlukan sentuhan yang sifatnya sistemik, karena di dalamnya menyangkut persoalan ekonomi, politik dan sosial budaya sebagai sebuah sistem sehingga penyelesaiannya pun harus sistemik pula. Berbagai aspek yang terkait dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan tentu saja memerangi serta mencegah anak putus sekolah memerlukan cara pandang dan penyelesaian yang melibatkan berbagai unsur baik di tingkat pemerintahan pusat hingga kelurahan dan Desa. Dalam aspek pendidikan diperlukan konsistensi kebijakan dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang menjamin anak-anak miskin dapat terus bersekolah. Sistem sosial kemasyarakatan dengan melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat untuk memantau dan menyadarkan bahwa sekolah sangat penting. Dari aspek ekonomi, dukungan dana pemerintah harus dibarengi juga dengan partisipasi dari masyarakat secara luas. Dari perspektif budaya, di-

mendorong suatu perubahan ke arah perilaku sebagai masyarakat pembelajar sehingga sekolah menjadi suatu kebutuhan. Demikianlah rangkaian merangkai dalam suatu sistem yang bertujuan tunggal mewujudkan anak untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak sehingga dapat menjadi modal dasar pengembangan dirinya kelak di masyarakat. Secara sederhana mata rantai komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Program wajib belajar ini harus didukung semua pihak. Kegagalan dalam mewujudkan misi dan kesepakatan tersebut dapat mencoreng wibawa dan nama baik negara di mata dunia internasional. Kita tentu tidak ingin menjadi pasien dari negara-negara donor yang seringkali menjadikan diri kita budak yang mudah diatur tanpa ada sikap kritis. Kesenjangan antara negara kaya dan berkembang serta miskin harus secara perlahan-lahan dihilangkan.



Keempat, sekolah harus menjamin dan memberikan kemudahan akses dan pelayanan pendidikan secara demokratis, egaliter dan bermartabat serta terjangkau. Sekolah jangan menjadi beban bagi anak didik terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu khususnya berkaitan dengan persoalan biaya. Pada sisi ini sekolah memang dilematis. Jika hanya mengandalkan bantuan pemerintah sementara kebutuhan untuk memajukan dan menyediakan fasilitas yang lengkap sebagai konsekuensi dari tuntutan dunia luar yang makin maju, tentunya dana dari pemerintah tidak mencukupi. Memang harus ada sumber alternatif diluar itu, yakni mengundang partisipasi masyarakat yang mampu serta dunia usaha dan dunia industri untuk bersama-sama memikirkan pendidikan yang berkualitas. Pada tataran ini, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner namun membumi dan berjiwa wira usaha sangat dibutuhkan.

Kelima, menyangkut fenomena anak-anak yang ingin sekolah tetapi tetap dapat bekerja, maka harus diupayakan dan dioptimalkan sekolah alternatif yang fleksibel. Selain paket A/B/C/ dan SMP terbuka harus terus dicarikan bentuk dan format sekolah alternatif lainnya. Sekolah alternatif ini harus mampu menjemput dan masuk pada dunia anak sebagai pekerja sehingga flek-

sibilitas dan inovasi dalam pengelolaan manajerial dan pembelajaran sangat dibutuhkan. Sekolah juga hendaknya menjadi ruang yang membebaskan dan menyenangkan serta menggairahkan. Sekolah harus mampu menjadi miniatur integrasi sosial yang menjunjung spirit pluralisme dan egalitarian dalam arti yang sesungguhnya. Sekolah model seperti ini perlahan tapi pasti akan banyak diminati anak yang bekerja tetapi tetap berminat untuk belajar. Hanya dengan memperoleh pendidikan yang baik, anak-anak harapan bangsa ini dapat membangun dunia yang lebih indah, dunia yang lebih nyaman, dunia tempat bersemayamnya nilai-nilai demokrasi menuju masyarakat madani.

Kita bersama-sama seluruh komponen bangsa memberikan kepedulian agar anak-anak terhindar dari putus sekolah. Selain itu menagih janji, apakah pemerintah SBY-JK serius menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hingga betul-betul ada potret riil yang indah dipandang bahwa tidak ada lagi anak putus sekolah pada tahun 2009 mendatang. Hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan benar-benar harus dilindungi.□